

## ABSTRAK

Pilkada 27 Juni 2018 merupakan tahap ketiga dari pelaksanaan pilkada serentak. Pilkada ini berlangsung dengan tahapan pemilihan dan hari pemungutan suara yang bersamaan. Di Provinsi Jawa Tengah terdapat 7 kabupaten/kota yang melaksanakan pilkada serentak 2018, salah satunya yaitu Kabupaten Temanggung. Dalam penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Temanggung dibutuhkan pengawasan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Temanggung guna mengawasi seluruh proses pilkada dan menangani berbagai pelanggaran agar pemilihan dapat berjalan dengan baik. Penelitian ini bertujuan mengetahui pelaksanaan tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Temanggung dalam Penyelesaian Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018 dan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Temanggung dalam penyelesaian pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018, serta upaya mengatasinya.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis. Sumber data penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data utama. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, juga menggunakan wawancara sebagai data penunjang. Data diolah dan dianalisis menggunakan analisis dengan pendekatan kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, Panwas Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan tugas dan wewenang pengawasan, melakukan strategi pengawasan yaitu pengawasan dalam konteks pencegahan/preventif dan penindakan/represif. Panwas Kabupaten Temanggung juga melakukan komunikasi dan kerjasama dengan instansi lain dalam rangka koordinasi dan mengoptimalkan fungsi pengawasan. Terdapat berbagai pelanggaran di beberapa tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018 dan Panwas Kabupaten Temanggung menangani pelanggaran tersebut sesuai dengan mekanisme yang berlaku namun terdapat beberapa hambatan yaitu: sumber daya manusia yang kurang memadai dan kemampuan di bidang hukum masih minim, pelapor dan saksi laporan dugaan pelanggaran tidak kooperatif dan sulit dicari, peran serta masyarakat yang masih rendah, dan jangka waktu penanganan pelanggaran yang singkat. Upaya dalam mengatasi hambatan tersebut yaitu dengan melaksanakan rapat koordinasi internal maupun eksternal, mengadakan beberapa kegiatan yang dilakukan bersama masyarakat dalam bentuk sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran dan animo masyarakat bahwa peran serta masyarakat sangatlah penting dalam rangka pengawasan pemilu. Panwas Kabupaten Temanggung juga berusaha untuk melakukan tindak lanjut atas temuan maupun laporan pelanggaran yang diterima.

**Kata Kunci: Tugas dan wewenang, Panitia Pengawas Kabupaten, Pelanggaran Pemilu**